

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN  
KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SEKTOR PARIWISATA

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Thomas Wigung Aji Prayitna

NIM: 102114015

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2014

HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN  
KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SEKTOR PARIWISATA

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Thomas Wigung Aji Prayitna

NIM: 102114015

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2014

Skripsi

HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN  
KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
SEKTOR PARIWISATA  
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Oleh:

**Thomas Wigung Aji Prayitna**

NIM: 102114015

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak, CA.

Tanggal: 5 Juni 2014

*Skripsi*

HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN  
KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SEKTOR PARIWISATA

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Thomas Wigung Aji Prayitna**

NIM: 102114015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 25 Juli 2014

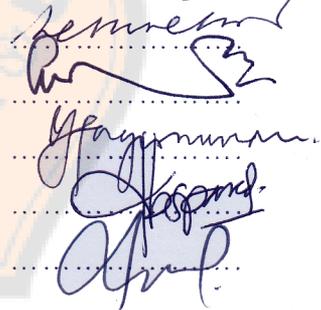
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Lengkap**

Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Anggraeni, S.E., M.Si., Ak., C.A.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A.
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., C.A.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., C.A.
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA.

**Tanda Tangan**



Yogyakarta, 31 Agustus 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

*FIAT VOLUNTAS TUA.*

*(Bunda Maria)*

*SUGIH TANPA BANDHA, DIGDAYA TANPA AJI,  
NGLURUK TANPA BALA, MENANG TANPA NGASORAKE.*

*(R.M.P Sosrokartono)*

*ORA NYOBA ORA BISA.*

*SEBUAH KESEMPURNAAN MEMBUTUHKAN PENGORBANAN  
YANG LEBIH DARI BIASANYA.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria*

*Bapakku Sujarwo dan Ibuku Yustina Sri Widati*

*Adikku Melania Martha Yutanti*

*Saudara-saudaraku*

*Sahabat-sahabatku*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

---

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

“HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PARIWISATA Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul”

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 Juli 2014 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 25 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

(Thomas Wigung Aji Prayitna)

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Thomas Wigung Aji Prayitna

NIM : 102114015

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PARIWISATA Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media alain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 25 Agustus 2014

Yang menyatakan



Thomas Wigung Aji Prayitna

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., C.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Nicko Kornelius Putra, S.E. dan Drs. G. Hendra Poerwanto, M.Si., yang telah memberikan banyak masukan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud Republik Indonesia yang telah membiayai penyusunan skripsi ini melalui Beasiswa Unggulan.
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Kepala dan jajaran Inspektorat Daerah, DPPKAD, dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul yang telah berkenan menjadi responden dalam penyusunan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Kedua orang tua, adik, keluarga besar Joyo Prayitno serta keluarga besar Ig. Sagiyo terkasih yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman MPT kelas Bu Gien pada khususnya dan teman-teman Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma angkatan 2010 pada umumnya yang selalu memberikan masukan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan kontraktor “Green House”, Baped, Bayu, Nando, Billi, Leon, Opik, dan Pak Yanto yang selalu memberikan dorongan, doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman OMK FX Jaranmati yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 Agustus 2014



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pengawasan .....	7
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	13
C. Penelitian Terdahulu .....	18
D. Hubungan antara Pengawasan Fungsional dan Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata .....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Jenis Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	25

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

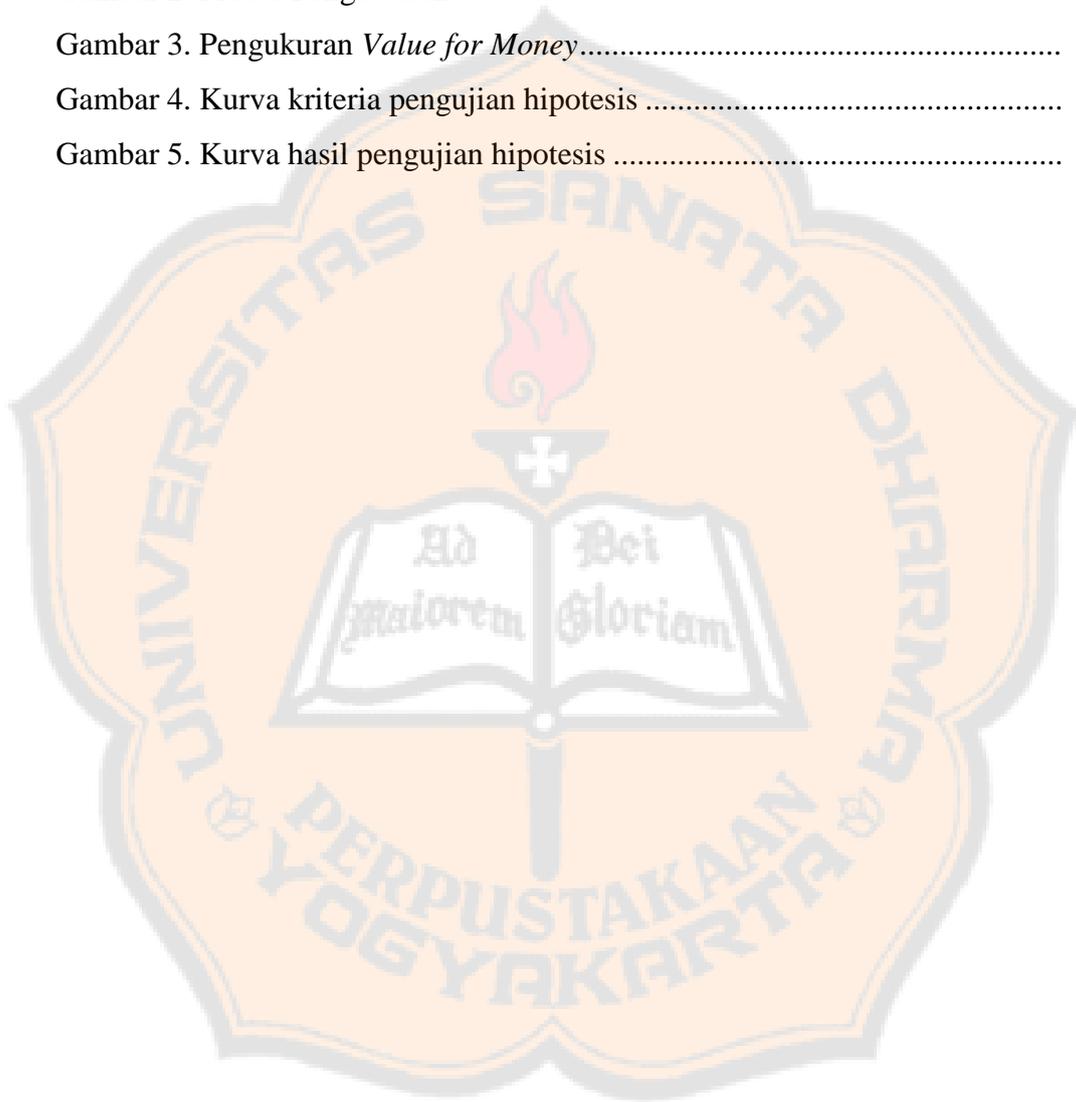
D. Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
E. Definisi Operasional Variabel.....	26
F. Populasi dan Sampel .....	29
G. Data .....	31
H. Teknik Pengumpulan Data.....	31
I. Pengujian Data Penelitian .....	33
J. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	38
B. DPPKAD Kabupaten Gunungkidul .....	41
C. Disbudpar Kabupaten Gunungkidul.....	45
D. Gambaran Pariwisata Gunungkidul .....	47
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Data Responden .....	53
B. Pengujian Data .....	55
C. Analisis Deskriptif Jawaban Kuesioner .....	58
D. Analisis Hubungan Pengawasan Fungsional dengan Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata .....	71
E. Pembahasan.....	74
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Keterbatasan Penelitian.....	79
C. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasionalisasi variabel Pengawasan Fungsional (X) .....	28
Tabel 2 Operasionalisasi variabel Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata (Y) ....	29
Tabel 3 Daftar Responden.....	30
Tabel 4 Skor jawaban kuesioner .....	35
Tabel 5 Responden berdasarkan jenis kelamin .....	53
Tabel 6 Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	54
Tabel 7 Responden berdasarkan Instansi Tempat Bertugas.....	55
Tabel 8 Hasil uji validitas .....	56
Tabel 9 Hasil uji validitas setelah pernyataan nomor 14 dihilangkan .....	57
Tabel 10 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 1 .....	58
Tabel 11 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 2.....	59
Tabel 12 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 3 .....	60
Tabel 13 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 4.....	61
Tabel 14 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 5.....	61
Tabel 15 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 6.....	62
Tabel 16 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 7 .....	63
Tabel 17 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 8.....	64
Tabel 18 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 9.....	65
Tabel 19 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 10.....	65
Tabel 20 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 11 .....	66
Tabel 21 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 12.....	67
Tabel 22 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 13.....	68
Tabel 23 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 15.....	68
Tabel 24 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 16.....	69
Tabel 25 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 17 .....	70
Tabel 26 tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 18.....	71
Tabel 27 Hasil Analisis Korelasi <i>Spearman Rank</i> .....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan pengawasan dengan fungsi manajemen lain.....	7
Gambar 2. Proses Pengawasan.....	8
Gambar 3. Pengukuran <i>Value for Money</i> .....	17
Gambar 4. Kurva kriteria pengujian hipotesis .....	37
Gambar 5. Kurva hasil pengujian hipotesis .....	73



**ABSTRAK**

**HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN  
KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
SEKTOR PARIWISATA  
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**

Thomas Wigung Aji Prayitna  
NIM: 102114015  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2014

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang penelitian ini adalah salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah bidang pariwisata, oleh karena itu potensi pariwisata perlu dikelola dengan baik agar mampu meningkatkan PAD yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan di segala bidang.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada PNS di Inspektorat Daerah, DPPKAD, dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi *Spearman Rank*.

Hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi *Spearman Rank* sebesar 0,502. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulan yang diambil adalah ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata. Hubungan positif menunjukkan bahwa jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata cenderung baik.

**ABSTRACT**

**CORRELATION BETWEEN FUNCTIONAL SUPERVISION AND  
PERFORMANCE OF TOURISM SECTOR OWN SOURCE REVENUE  
MANAGEMENT**

**A case study at Gunungkidul Regency Government**

Thomas Wigung Aji Prayitna

NIM: 102114015

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2014

This research aims to determine the relationship between functional supervision and performance of tourism sector own source revenue management in Gunungkidul Regency Government. The background of this research is one of development priorities in Gunungkidul is the tourism sector, therefore tourism potential needs to be managed properly in order to raise revenue which is then used for development in all sector.

This research is case study. Data obtained by distributing questionnaires to civil servants in the Regional Inspectorate, DPPKAD, and Disbudpar Gunungkidul. The data analysis technique used is the Spearman Rank correlation.

The result of the data analysis show the Spearman Rank correlation coefficient of 0,502. The test result showed that t count greather than t tabel, so  $H_0$  is rejected and  $H_a$  accepted. The conclusion is that there is a positive relationship between the functional supervision and performance of tourism sector own source revenue management. Positive relationship indicates that if the functional supervision is well executed, the performance of tourism sector own source revenue management tends to be good.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

“Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi” (Daft 2009:6). “Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan” (Mahsun 2011:1).

Fungsi pokok manajemen berdasarkan pengertian di atas meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Fungsi-fungsi pokok manajemen dijalankan oleh setiap organisasi, baik *pure profit organization* maupun *pure nonprofit organization*. Mahsun (2011: 4) menjelaskan *pure profit organization* merupakan organisasi yang tujuannya memperoleh laba sebesar-besarnya demi kepentingan pemilik, sedangkan *pure nonprofit organization* merupakan organisasi yang tujuannya memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu instansi pemerintah yang merupakan *pure nonprofit organization* juga melaksanakan fungsi pokok manajemen. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan fungsi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuannya.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025. RPJPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi empat tahapan dan prioritas, masing-masing tahapan dilaksanakan dalam lima tahun.

Pada tahun 2013, RPJPD Kabupaten Gunungkidul telah memasuki tahap lima tahun ke dua (periode 2010-2015). Pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahap lima tahun kedua ini, tertulis bahwa Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus melakukan pengembangan pada sektor pariwisata.

Sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah objek wisata dan meningkatnya jumlah wisatawan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2011 tercatat dua belas objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah (BPS Kabupaten Gunungkidul 2011:181), sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi delapan belas objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah (BPS Kabupaten Gunungkidul 2012:181). Jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada tahun 2011 adalah sebesar 548.587 orang (BPS Kabupaten Gunungkidul 2011:181), angka tersebut naik menjadi 615.922 orang pada tahun 2012 (BPS Kabupaten Gunungkidul 2012:181).

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang besar berupa objek-objek wisata, baik wisata alam, wisata budaya dan sejarah, maupun wisata

buatan. Tidak setiap daerah memiliki potensi pariwisata yang besar seperti di Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan pengelolaan potensi pariwisata secara efektif dan efisien. Pengelolaan potensi pariwisata yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengoptimalkan PAD yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata (Disbudpar) Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga yang mengelola potensi pariwisata memiliki berbagai tugas dan fungsi yang salah satunya adalah mengelola PAD sektor pariwisata. Untuk menjamin pengelolaan PAD yang baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat sebagaimana tertulis dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat terhadap pengelolaan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh atasan dalam hal ini Kepala Disbudpar Kabupaten Gunungkidul.

Pengawasan fungsional sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pengawasan fungsional di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku badan pengawas daerah atau auditor internal pemerintah daerah.

Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Disbudpar Kabupaten Gunungkidul. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudi Harto, Andhika Ardiansyah dan Dina Handayani dengan topik penelitian yang sama menghasilkan kesimpulan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah secara umum. Pembaharuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lebih fokus meneliti hubungan antara pengawasan fungsional dengan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata.

Pada umumnya variabel dependen (Y) pada penelitian sebelumnya adalah pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini difokuskan tentang kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata, mengingat subjek penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul. Di mana Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat di bidang pariwisata.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah ada hubungan antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menurut persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah

1. Kriteria yang digunakan untuk mengukur pengawasan fungsional dalam penelitian ini adalah empat kriteria dari lima kriteria utama pengawasan yang efektif berdasarkan teori pada buku Handoko (2009) yaitu (1) akurat, (2) tepat waktu, (3) terpusat pada titik-titik strategis, dan (4) bersifat sebagai petunjuk/ operasional. Empat kriteria tersebut dipilih karena mudah untuk disusun dan dijabarkan menjadi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.
2. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata dalam penelitian ini adalah dua kriteria dari enam indikator kinerja pemerintah daerah berdasarkan teori pada buku Mahsun (2011) dan buku Mardiasmo (2005). Dua kriteria tersebut dipilih karena merupakan indikator untuk mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menurut persepsi PNS di Inspektorat Daerah, DPPKAD, dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk penerapan pengawasan fungsional yang efektif demi terwujudnya kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata yang efektif.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma (USD), penelitian ini diharapkan menambah koleksi karya tulis mahasiswa khususnya koleksi di Perpustakaan Pusat USD dan Pojok Bursa Fakultas Ekonomi USD.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama dengan topik yang sama.
4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD.

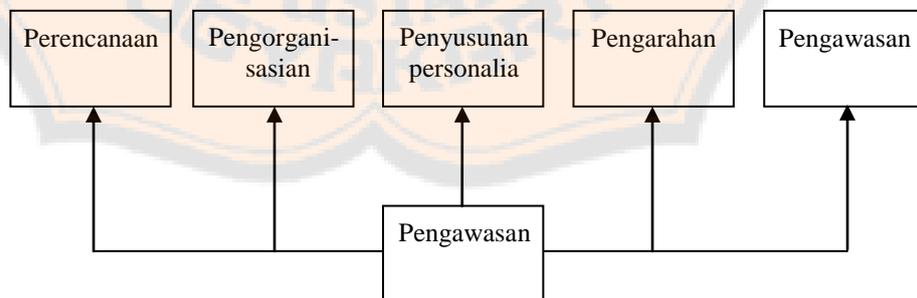
## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

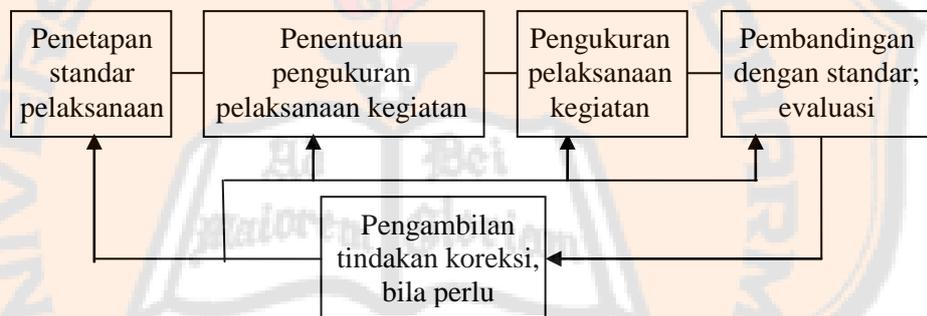
“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan” (Handoko 2009: 360). Pengawasan berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan membantu menilai apakah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan telah dilaksanakan dengan efektif. Fungsi pengawasan internal juga perlu diawasi oleh pihak independen (pengawasan eksternal) agar pengawasan internal dapat dilaksanakan dengan baik. Hubungan antara fungsi pengawasan dengan fungsi manajemen lainnya ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini:



Gambar 1: Hubungan pengawasan dengan fungsi manajemen lain  
Sumber: Handoko 2009:360

2. Proses Pengawasan

Proses pengawasan pada umumnya terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah) berikut ini: (1) penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), (2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, (3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, (4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan (5) pengambilan tindakan koreksi (Handoko 2009:362-363). Tahap-tahap dalam pengawasan dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2: Proses Pengawasan  
 Sumber: Handoko 2009:363

3. Efektivitas Pengawasan

Pengawasan perlu dilaksanakan secara efektif. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang mencukupi dan tidak berlebihan, sebaliknya pengawasan yang tidak efektif adalah pengawasan yang tidak mencukupi dan berlebihan. Pengawasan yang tidak mencukupi dapat membuat pencapaian tujuan semakin sulit karena tidak terdeteksinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi dan mematikan kreativitas karyawan/pegawai sehingga merugikan organisasi.

Handoko (2009:373) menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif memenuhi kriteria utama yaitu (1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, (2) tepat waktu, (3) dengan biaya yang efektif, (4) tepat-akurat, dan (5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Kelima kriteria tersebut dijabarkan menjadi sepuluh kriteria yaitu (1) akurat, (2) tepat waktu, (3) obyektif dan menyeluruh, (4) terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, (5) realistis secara ekonomis, (6) realistis secara organisasional, (7) terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, (8) fleksibel, (9) bersifat sebagai petunjuk dan operasional, (10) diterima para anggota organisasi.

Pengawasan yang akurat berarti informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Informasi yang akurat diperoleh dari sumber yang relevan dengan bidang pengawasan serta didukung data yang memadai. Informasi dalam pengawasan harus akurat, karena informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan pengambilan tindakan koreksi yang keliru dan pengawasan menjadi tidak efektif.

Pengawasan yang tepat waktu berarti informasi dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya untuk melakukan kegiatan perbaikan. Pengawasan yang terlambat menjadi tidak berguna secara maksimal untuk perbaikan organisasi sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.

Pengawasan yang obyektif dan menyeluruh adalah pengawasan yang menghasilkan informasi yang obyektif dan lengkap untuk melakukan perbaikan organisasi.

Pengawasan harus terpusat pada titik-titik strategik yaitu bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang fatal.

Pengawasan yang realistik secara ekonomis berarti biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari pengawasan tersebut. Pengawasan yang realistik secara organisasional berarti sistem pengawasan harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

Pengawasan yang fleksibel berarti pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

Pengawasan bersifat sebagai petunjuk dan operasional yaitu mampu menunjukkan deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

Pengawasan harus dapat diterima para anggota organisasi dalam arti pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

#### 4. Pengawasan Fungsional

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk menjamin pencapaian atas tujuan organisasi termasuk target-target yang telah ditentukan. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Macam-macam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi (1) pengawasan represif, (2) pengawasan fungsional, (3) pengawasan legislatif, dan (4) pengawasan masyarakat.

Pengawasan fungsional merupakan salah satu komponen pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengertian pengawasan fungsional menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

Pengertian pengawasan fungsional menurut Abdul Halim yang dikutip oleh Ardiansyah (2010:11) adalah segala kegiatan dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian pengawasan fungsional menurut Ihyaul Ulum yang dikutip oleh Handayani (2008:4) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan penelitian ini, pengawasan fungsional yang diteliti oleh penulis adalah pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku instansi pengawas pemerintah daerah.

Pengawasan fungsional yang efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memenuhi kriteria (1) akurat, (2) tepat waktu, (3) obyektif dan menyeluruh, (4) terpusat pada titik-titik

pengawasan strategis, (5) realistik secara ekonomis, (6) realistik secara organisasional, (7) terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, (8) fleksibel, (9) bersifat sebagai petunjuk dan operasional, (10) diterima para anggota organisasi sesuai teori Handoko yang telah dijelaskan di atas.

## **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **1. Pengertian PAD**

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikelompokkan atas (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD meliputi (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mahsun (2011:95) mendiskripsikan penerimaan daerah sebagai berikut:

Transaksi penerimaan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Transaksi penerimaan daerah yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi penerimaan dari (1) retribusi masuk tempat rekreasi dan olahraga, (2) retribusi tempat khusus parkir, (3) retribusi pesanggrahan, villa, dan penginapan, (4) retribusi persampahan/ kebersihan, dan (5) retribusi pemakaian kekayaan daerah.

## 2. Kinerja Pengelolaan PAD

Pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategik planning* suatu organisasi” (Mahsun 2011:141).

Kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian pengelolaan PAD pada sektor pariwisata sesuai tujuan

atau target yang telah ditentukan. Semakin tinggi tingkat pencapaian pengelolaan PAD, maka kinerjanya semakin baik atau semakin efektif. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian pengelolaan PAD, maka kinerjanya semakin buruk atau tidak efektif.

### 3. Indikator kinerja pengelolaan PAD

Kinerja organisasi perlu diukur secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi serta untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi diperlukan indikator pengukuran. Mahsun (2006:196) menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut meliputi (1) indikator masukan, (2) indikator proses, (3) indikator keluaran, (4) indikator hasil, (5) indikator manfaat, dan (6) indikator *impact*.

Indikator masukan merupakan indikator tentang masukan yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, infrastruktur, sarana, dan prasarana.

Indikator proses merupakan indikator tentang pelaksanaan pemerintahan di mana pemerintah daerah mengelola masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output*. Indikator proses meliputi ketaatan pada peraturan perundangan dan prosedur atau mekanisme dalam menjalankan pemerintahan.

Indikator keluaran (*output*) merupakan indikator tentang hasil dari proses pengelolaan masukan. Indikator keluaran meliputi jumlah produk pemerintah dan ketepatan dalam produksi produk pemerintah daerah.

Indikator hasil (*outcome*) merupakan indikator tentang hasil dari suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Indikator hasil meliputi kualitas produk pemerintah dan produktivitas para pegawai.

Indikator manfaat merupakan indikator yang berkaitan dengan manfaat/*benefit* yang dihasilkan oleh suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Indikator manfaat meliputi tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

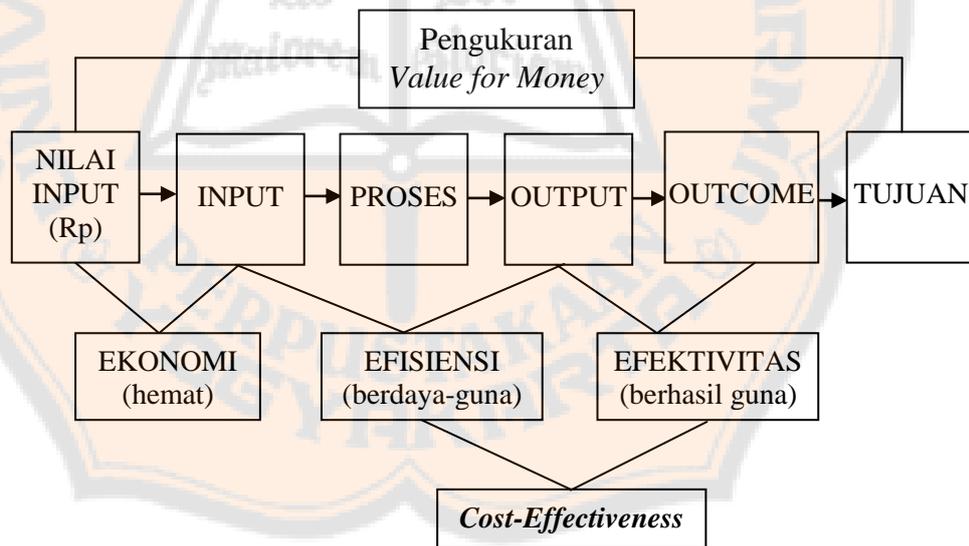
Indikator *impact* merupakan indikator yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari suatu proses yang dijalankan pemerintah. Indikator *impact* meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Keenam indikator kinerja di atas terkait dengan konsep *value for money*. Konsep *value for money* ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh yaitu meliputi pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo (2005:131-132) menjelaskan konsep *value for money* sebagai berikut:

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Pengertian efektivitas pada

dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Ekonomi membahas masukan sehingga untuk mengukurnya digunakan indikator masukan (*input*). Efisiensi membandingkan antara masukan yang digunakan dan keluaran yang dihasilkan, dengan demikian untuk mengukur efisiensi digunakan indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Efektivitas menunjukkan keluaran (*output*) dan berfungsinya keluaran, sehingga untuk mengukur efektivitas digunakan indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Ketiga unsur *value for money* tersebut di atas saling terkait. Hubungan antara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3: Pengukuran *Value for Money*  
 Sumber: Mardiasmo (2005:132)

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa untuk mengukur efektivitas kinerja digunakan dua indikator yaitu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Penelitian ini mengukur efektivitas kinerja sehingga hanya menggunakan dua indikator tersebut.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Harto:2012).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pengawasan melekat dan pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya, antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan), Lembaga Teknis Daerah (Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat), dan Kecamatan (Kawalu, Tawang, Tamansari).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan

keuangan daerah digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik menggunakan analisis korelasi, analisis regresi berganda, koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengawasan melekat dan pengawasan fungsional memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (efektivitas keuangan daerah) sebesar 91,4% sedangkan sisanya 8,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Ardiansyah: 2010)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis adalah Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Surapati No. 4 Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dari pegawai Bappeda yang diperoleh dengan teknik wawancara,

observasi, kuesioner, dan studi literatur. Analisis statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi *Rank Spearman* dan uji hipotesis.

Pengujian statistik menunjukkan  $r_s$  hitung (0,835) >  $r_s$  tabel (0,544), sedangkan nilai  $t$  hitung (5,032) >  $t$  tabel (2,201) yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Nilai koefisien determinasi sebesar 69,72% menunjukkan besarnya pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan pengaruh senilai 30,28% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengawasan fungsional turut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Peranan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Handayani:2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan fungsional berperan positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengawasan fungsional sebagai variabel independen (X) dan efektivitas pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap sumber data yang akan dianalisis dengan cara melakukan observasi, wawancara dan kuesioner.

Dari data yang diperoleh, kemudian dilakukan pengujian hipotesis dan dianalisis dengan menggunakan analisis *rank spearman* dan koefisien determinasi. Dengan analisis *rank spearman* sebesar 0,920, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat erat antara pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk koefisien determinasi sebesar 84,64% menunjukkan besarnya peranan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan 15,36% merupakan peranan faktor-faktor lain terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, menunjukkan ditolaknya hipotesis nol.

Berdasarkan hasil pengujian statistik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan positif yang signifikan yaitu sebesar 0,920 antara pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **D. Hubungan antara Pengawasan Fungsional dan Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata**

Pengawasan fungsional merupakan komponen yang penting dalam praktik pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan fungsional dilakukan oleh pihak independen untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan agar sesuai target dan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan fungsional perlu dilakukan dengan baik agar dapat benar-benar menjamin pelaksanaan pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan

fungsional yang baik ditunjukkan dengan beberapa kriteria, terutama akurat, tepat waktu, terpusat pada titik-titik strategis, dan bersifat sebagai petunjuk/ operasional.

Objek pengawasan fungsional adalah pelaksanaan pemerintahan dalam semua bidang. Salah satu bidang di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi objek pengawasan fungsional adalah pengelolaan PAD sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Disbudpar. Pengelolaan PAD sektor pariwisata meliputi semua kegiatan untuk mengelola PAD sektor Pariwisata mulai dari pemungutan hingga penyetoran ke kas daerah. Pengelolaan PAD sektor pariwisata perlu dilaksanakan dengan baik mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yang besar. Kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata dapat dilihat dari keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Sesuai dengan teori manajemen bahwa fungsi-fungsi pokok manajemen saling berhubungan, maka pengawasan fungsional dengan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata juga memiliki hubungan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dapat terlaksana dengan baik sesuai target dan aturan.

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teori pengawasan fungsional menurut Handoko dan teori kinerja pemerintah daerah menurut Mardiasmo. Pengawasan fungsional yang baik diukur dari empat sub variabel yaitu akurat, tepat waktu, terpusat pada titik-titik strategis, dan bersifat sebagai petunjuk/ operasional. Kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dari dua sub variabel yaitu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Pihak yang melakukan pengawasan fungsional dalam penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dilihat dari definisinya, pengawasan fungsional dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan sesuai target dan rencana. Target dan rencana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul salah satunya adalah pengelolaan PAD sektor pariwisata yang baik. Oleh sebab itu pengawasan fungsional dilakukan untuk menjamin agar pengelolaan PAD sektor pariwisata terlaksana dengan baik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata juga baik. Sebaliknya jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan tidak baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata juga tidak baik.

Dari uraian tersebut di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ho: Tidak ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Ha: Ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sugiyono (2009:13) menjelaskan pengertian metode penelitian kuantitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

##### B. Jenis Penelitian

*“Case studies involve in-depth, contextual analyses of similar situations in other organizations, where the nature and definition of the problem happen to be the same as experienced in the current situation”* (Sekaran 2009:30). Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang hubungan antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata. Kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah PNS di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Daerah adalah pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah termasuk salah satunya pengawasan terhadap pengelolaan PAD. DPPKAD adalah pihak yang mengkoordinasi pengelolaan pendapatan, kekayaan, dan aset daerah termasuk salah satunya pengelolaan PAD. Disbudpar adalah pihak yang melakukan pengelolaan PAD khususnya sektor pariwisata.

Objek dari penelitian ini adalah hubungan antara pengawasan fungsional dengan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata pada tahun 2013 menurut persepsi PNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul.

### **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah (1) Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di Komplek Bangsal Sewokoprojo, (2) Kantor DPPKAD Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, dan (3) Kantor Disbudpar Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di Jalan K.H. Agus Salim No 126 Wonosari. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2014 sampai dengan Bulan April 2014.

### E. Definisi Operasional Variabel

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2009:58) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang berupa pengawasan fungsional (X) dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata (Y).

Variabel X dalam penelitian ini adalah pengawasan fungsional. Untuk mengukur pengawasan fungsional yang efektif digunakan empat sub variabel yaitu akurat, tepat waktu, terpusat pada titik-titik strategis, dan bersifat sebagai petunjuk/operasional.

Akurat berkaitan dengan sumber informasi dan data pendukung. Pengawasan fungsional di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikatakan efektif jika informasi pengawasan diperoleh dari pejabat dan pegawai dari Disbudpar yang benar-benar mengetahui bidang yang menjadi objek pengawasan serta didukung data-data yang memadai.

Tepat waktu berkaitan dengan pengumpulan informasi, evaluasi, penyampaian laporan hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu. Jadwal kegiatan pengawasan hingga penyampaian laporan hasil pengawasan terhadap Disbudpar Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pada bulan November, sedangkan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan pada bulan Desember. Pengawasan fungsional di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikatakan efektif jika waktu pelaksanaan pengawasan,

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rencana yang telah ditetapkan yaitu pada bulan November untuk pelaksanaan dan pelaporan, dan pada bulan Desember untuk tindak lanjut.

Terpusat pada titik-titik strategis berkaitan dengan fokus pengawasan pada kegiatan-kegiatan di mana penyimpangan paling sering terjadi. Kegiatan-kegiatan yang strategis dalam pengelolaan PAD meliputi pengelolaan anggaran, pemungutan retribusi pariwisata, dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pariwisata. Pengawasan fungsional di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pengelolaan PAD dikatakan efektif jika kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah menjadi fokus pengawasan.

Bersifat sebagai petunjuk/operasional berkaitan dengan kemampuan laporan hasil pemeriksaan untuk menyajikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan rekomendasi yang perlu dilakukan. Pengawasan fungsional di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikatakan efektif jika laporan hasil pengawasan telah menunjukkan penyimpangan dari standar atau aturan yang berlaku disertai rekomendasi tindakan perbaikan dan mampu dipahami oleh pihak Disbudpar.

Variabel Y dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata. Untuk mengukur kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata yang efektif digunakan dua subvariabel yaitu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Keluaran (*output*) berkaitan dengan hasil dari proses pengelolaan PAD. Target PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 adalah Rp5,1 milyar. Kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata

di Kabupaten Gunungkidul dikatakan efektif jika target tersebut telah tercapai. Selain target PAD, kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dikatakan efektif jika tidak ada pengaduan atau keluhan dari pengunjung objek wisata terkait pelayanan petugas dan tidak ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan PAD sektor pariwisata.

Hasil (*outcome*) berkaitan dengan berfungsinya keluaran dalam jangka menengah. Hasil pemungutan retribusi pariwisata ditujukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul, PAD Desa, dan pendapatan masyarakat. Kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dikatakan efektif jika telah mampu meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul, PAD Desa, dan pendapatan masyarakat.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel Pengawasan Fungsional (X)

Subvariabel	Indikator	Kuesioner
Akurat	a. Sumber informasi yang relevan b. Informasi didukung data yang memadai c. Kesimpulan pengawasan diperoleh dari lebih dari satu sumber	1-3
Tepat Waktu	a. Pelaksanaan dan pelaporan sesuai waktu yang direncanakan yaitu pada bulan November b. Tindak lanjut sesuai waktu yang direncanakan yaitu pada bulan Desember	4-6
Terpusat pada titik-titik strategis	Fokus pengawasan meliputi kegiatan pengelolaan keuangan, kegiatan pemungutan retribusi, dan kegiatan penyetoran hasil pemungutan retribusi	7-9
Bersifat sebagai petunjuk/operasional	a. Laporan berisi penyimpangan yang ditemukan dan berisi rekomendasi b. Laporan dapat dipahami oleh Disbudpar	10-12

Tabel 2. Operasionalisasi variabel Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata (Y)

Subvariabel	Indikator	Kuesioner
Keluaran ( <i>output</i> )	a. Penerimaan sektor pariwisata mencapai target yaitu sebesar Rp5,1 milyar. b. Tidak ada pengaduan dari pengunjung c. Tidak ada indikasi terjadinya penyimpangan	13-15
Hasil ( <i>outcome</i> )	PAD sektor pariwisata meningkatkan PAD Kabupaten, PAD Desa, dan pendapatan masyarakat	16-18

#### F. Populasi dan Sampel

“The population refers to the entire group of people, events, or things of interest that the researcher wishes to investigate” (Sekaran 2009:262).

Populasi penelitian ini adalah PNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul. Jumlah populasi dari ketiga lembaga tersebut adalah 150 orang.

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono 2009:116). “A sample is thus a subgroup or subset of the population” (Sekaran 2009:263). Kesimpulan yang diperoleh dari dua pengertian di atas adalah bahwa sampel merupakan bagian dari populasi.

Pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel nonprobabilitas berupa *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan. “Pengambilan sampel bertujuan dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu” (Jogiyanto 2010:79).

Pengambilan sampel bertujuan ini berdasarkan pertimbangan (*judgment*). Pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah tidak semua PNS di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kantor DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, dan Kantor Disbudpar Kabupaten Gunungkidul mengetahui data yang terkait dengan masalah penelitian sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PNS dalam bidang yang terkait dengan data yang diperlukan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kantor DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, dan Kantor Disbudpar Kabupaten Gunungkidul agar data yang diperoleh akurat. Mengingat objek penelitian ini adalah persepsi PNS maka sampel yang dipilih adalah PNS yang benar-benar mengetahui data yang terkait dengan masalah penelitian agar persepsinya mendekati kenyataan yang ada.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Daftar responden dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan di atas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Daftar responden

No.	Jabatan/posisi	Jumlah
1.	Kepala SKPD*) (Inspektorat, DPPKAD, Disbudpar)	3
2.	Sekretaris SKPD*) (Inspektorat, DPPKAD, Disbudpar)	3
3.	Kepala Bidang pada tiap SKPD*) (Inspektorat, DPPKAD, Disbudpar)	10
4.	Bagian Fungsional:	
	a. auditor Inspektorat	6
	b. petugas pungut retribusi Disbudpar	8
Jumlah Responden		30

\*) SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah  
 Sumber: [www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id)

## G. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum organisasi, meliputi:
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
  - b. DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
  - c. Disbudpar Kabupaten Gunungkidul
2. Data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yaitu tentang pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata.

## H. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

*“A questionnaire is a preformulated written set of questions to which respondents record their answer, usually within rather closely defined alternative”* (Sekaran 2010:197). Kuesioner dalam penelitian ini merupakan instrumen pengumpulan data yang utama yaitu data yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan masalah pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata.

Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini disusun berdasarkan beberapa sumber berikut ini:

- a. Teori tentang kriteria pengawasan yang efektif dalam buku Handoko (2009).
- b. Teori tentang indikator kinerja pemerintah daerah dalam buku Mahsun (2006) dan Mardiasmo (2005).

- c. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 34/DPA/2013 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.
- d. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 415/ KPTS/ 2012 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013.

Kuesioner yang disusun adalah kuesioner tertutup di mana jawaban telah tersedia dalam lima pilihan yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, kuesioner akan diuji terlebih dahulu.

## 2. Pengumpulan data arsip

Pengumpulan data arsip dari Inspektorat Daerah Gunungkidul, DPPKAD Kabupaten Gunungkidul dan Disbudpar Kabupaten Gunungkidul digunakan untuk memperkuat jawaban atas kuesioner. Data arsip yang diperlukan adalah dokumen tentang rencana pengawasan Inspektorat, hasil pengawasan Inspektorat, rencana atau target penerimaan sektor pariwisata, dan laporan penerimaan sektor pariwisata.

## 3. Studi literatur

Studi literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti digunakan untuk memperkuat teori dan pemahaman penulis atas masalah yang diteliti. Studi literatur diperlukan untuk memperoleh teori-teori tentang manajemen, pengawasan fungsional, efektivitas, dan kinerja pengelolaan PAD.

## I. Pengujian Data Penelitian

Data yang telah diperoleh dengan kuesioner kemudian diuji. Pengujian yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

### 1. Uji Validitas

Sugiyono (2009:172) menyatakan bahwa instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan uji validitas ini adalah untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian telah valid.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* oleh Karl Pearson dalam buku Hasan (2004:61) antara setiap butir dengan skor totalnya yang dinyatakan dengan rumus berikut ini:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$r_{xy}$  = korelasi

X = skor butir pernyataan ke 1, 2, 3...

Y = skor total

N = jumlah responden

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara korelasi ( $r_{xy}$ ) dengan nilai kritis. Instrumen dikatakan valid jika  $r_{xy}$  dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis dengan tingkat kesalahan (Sig.) sama dengan 5% . Instrumen yang telah valid dapat memenuhi pengujian selanjutnya.

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah instrumen penelitian diketahui validitasnya. Sugiyono (2009:172-173) menyatakan bahwa instrumen yang

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas ini berkaitan dengan akurasi dan konsistensi pengukurannya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik belah dua oleh Spearman Brown dalam buku Sugiyono (2009:186) yang dinyatakan dengan rumus berikut ini:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

$r_i$  = reliabilitas internal seluruh instrumen

$r_b$  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara reliabilitas internal ( $r_i$ ) dengan nilai kritis. Kriteria nilai kritis reliabilitas dijelaskan oleh Sekaran (2009). *In general, reliabilities less than 0,60 are considered to be poor, those in the 0,70 range, acceptable, and those over 0,80 good* (Sekaran 2009: 325).

#### J. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2009:206) menyatakan teknik analisis data sebagai berikut:

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini dimulai dengan pemberian skor pada jawaban

responden atas pertanyaan dalam kuesioner. Berikut ini skor untuk masing-masing jawaban atas kuesioner:

Tabel 4. Skor jawaban kuesioner

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2009:133)

Data yang telah diberi skor kemudian dimasukkan dalam tabel. Tabel dibuat untuk mempermudah dalam pengolahan statistik. Kolom tabel terdiri dari nomor responden dan kedelapan belas item pernyataan, sedangkan baris terdiri dari nomor responden, ketigapuluh responden, dan jumlah.

Data yang telah dimasukkan dalam tabel kemudian dianalisis. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif ini, jawaban responden atas masing-masing butir pernyataan dihitung. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk mengetahui frekuensi masing-masing jawaban responden pada masing-masing butir pernyataan.

Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah analisis untuk menjawab masalah penelitian dengan mencari koefisien korelasi. Model koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model statistik Korelasi Spearman Rank. "Korelasi Spearman Rank digunakan mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal, dan sumber data antar variabel tidak

harus sama” (Sugiyono 2009:356). Berikut ini rumus korelasi Spearman Rank dalam buku Hasan (2004:57):

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n^3 - d}$$

$r_s$  = koefisien korelasi *Spearman Rank*

$d$  = selisih *rank* antara X ( $R_x$ ) dan Y ( $R_y$ )

$n$  = banyaknya pasangan *rank*

Setelah diketahui nilai koefisien korelasi *Spearman Rank* ( $r_s$ ), kemudian dilakukan uji t karena penelitian ini menggunakan sampel kecil ( $n \leq 30$ ). Uji t ini dilakukan untuk menguji hipotesis, berikut ini prosedur uji statistiknya:

1. Menentukan formulasi hipotesis, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

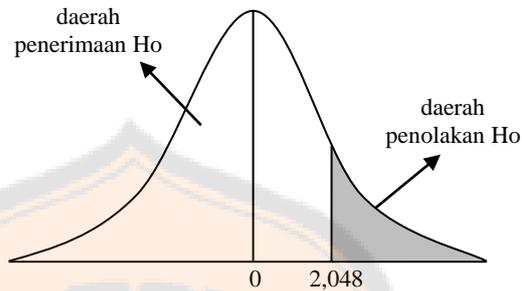
$H_0$ : Tidak ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

$H_a$ : Ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

2. Menentukan taraf nyata ( $\alpha$ ) dan t tabel. Taraf nyata yang digunakan adalah 2,5% uji satu arah dengan n sebesar 30, maka derajat bebas adalah 28. Besar t tabel untuk  $t_{25;28} = 2,048$ .
3. Menentukan kriteria pengujian, berikut ini kriteria pengujian hipotesis:
 

$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} \leq 2,048$

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > 2,048$



Gambar 4: Kurva kriteria pengujian hipotesis  
 Sumber: Sugiyono (2009:228)

4. Menghitung nilai uji statistik dengan rumus uji t dalam buku Hasan (2004:88) berikut ini:

$$t_0 = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

$t_0$  = nilai uji t

$r_s$  = nilai koefisien korelasi *Spearman Rank*

n = jumlah sampel

5. Mengambil kesimpulan berdasarkan perbandingan  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sedangkan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

##### 1. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008. Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

##### 2. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah “Aparatur pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan, pemerintahan serta pembangunan yang berkualitas”. Misi Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional, responsif dan jujur,
- b. peningkatan pengelolaan keuangan di tingkat SKPD dan Kabupaten,

- c. peningkatan kualitas pengawasan berbasis Sistem Pengendalian Intern (SPI).

### 3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 196 Tahun 2008.

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan/pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan,
- b. perencanaan program pengawasan,
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
- e. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan,
- f. pemeriksaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan ketatalaksanaan,
- g. pelaksanaan pengujian dan penilaian pelaporan perangkat daerah,
- h. pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, ketatalaksanaan,

- i. penyampaian saran tindakan preventif dan atau refresif berdasarkan hasil pemeriksaan,
  - j. pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan,
  - k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pengawasan, dan
  - l. pengelolaan ketatausahaan Inspektorat Daerah.
4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 196 Tahun 2008. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

- a. Inspektur,
- b. Sekretaris, yang terdiri dari:
  - 1) Subbagian Perencanaan,
  - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,
  - 3) Subbagian Umum,
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan,
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian,
- e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terlampir.

## **B. DPPKAD Kabupaten Gunungkidul**

### **1. Gambaran Umum**

DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011. DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. DPPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Visi dan Misi**

Visi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul adalah “Terwujudnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang andal, transparan, akuntabel dan prima dalam memberikan pelayanan.” Misi DPPKAD dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi,
- c. mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi DPPKAD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2011. Tugas DPPKAD adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Fungsi DPPKAD adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah,
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah,
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah,
- d. pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah,
- e. pembinaan pendapatan daerah,
- f. pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan,
- g. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD,
- i. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah,
- j. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah,
- k. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah,
- l. pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,

- m. pengelolaan barang milik daerah,
- n. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD),
- o. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD,
- p. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset,
- q. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah,
- r. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan
- s. pengelolaan kesekretariatan dinas.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPPKAD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2011. Struktur organisasi DPPKAD terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum.

- c. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan, yang terdiri dari tiga Seksi yaitu Seksi Pendataan dan Penilaian, Seksi Pengolahan Data dan Penetapan, dan Seksi Bina Pendapatan.
- d. Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah, yang terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan.
- e. Bidang Anggaran, yang terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Penyusun Anggaran dan Seksi Pengendalian Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari tiga Seksi yaitu Seksi Perbendaharaan Pendapatan, Seksi Perbendaharaan Belanja Non Gaji, dan Seksi Perbendaharaan Belanja Gaji.
- g. Bidang Akuntansi, yang terdiri dari tiga Seksi yaitu Seksi Akuntansi Pendapatan, Seksi Akuntansi Belanja, dan Seksi Akuntansi Aset dan Selain Kas.
- h. Bidang Aset, yang terdiri dari tiga Seksi yaitu Seksi Perencanaan Aset, Seksi Pendayagunaan Aset, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Aset.
- i. Unit Pelaksana Teknis,
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi DPPKAD terlampir.

### C. Disbudpar Kabupaten Gunungkidul

#### 1. Gambaran Umum

Disbudpar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011. Disbudpar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Disbudpar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Visi dan Misi

Visi Disbudpar Kabupaten Gunungkidul adalah “Terwujudnya Kebudayaan dan Pariwisata yang maju, berkembang, kompetitif, lestari, dan berkelanjutan”. Misi yang dilaksanakan oleh Disbudpar dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan,
- b. meningkatkan dan mengembangkan objek daya tarik wisata,
- c. meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata,
- d. meningkatkan pemasaran pariwisata, dan
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Disbudpar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2011. Tugas Disbudpar Kabupaten Gunungkidul adalah

melakukan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Fungsi Disbudpar Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan dan kepariwisataan,
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan,
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata,
- d. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata,
- e. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata,
- f. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya,
- g. perlindungan benda-benda cagar budaya,
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan,
- i. pengelolaan UPT, dan
- j. pengelolaan kesekretariatan dinas.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Disbudpar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2011. Struktur organisasi Disbudpar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, yang terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum.
  - c. Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Seksi Perlindungan Benda Cagar Budaya.
  - d. Bidang Pengembangan Produk Wisata, yang terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata, dan Seksi Sarana Wisata.
  - e. Bidang Usaha dan Pemasaran Wisata, yang terdiri dari dua Seksi yaitu Seksi Bina Usaha Wisata dan Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata.
  - f. UPT,
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan struktur organisasi Disbudpar Kabupaten Gunungkidul terlampir.

#### **D. Gambaran Pariwisata Gunungkidul**

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi objek wisata yang cukup potensial dan beragam yang tersebar di hampir delapan belas kecamatan. Objek wisata yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul berupa objek wisata alam, objek wisata budaya dan sejarah, dan objek wisata buatan.

Potensi pariwisata ini sangat berarti sejalan dengan keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah Propinsi Bali. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

melalui Disbudpar melakukan pengembangan dan pembangunan objek wisata dan sarana pendukungnya dari tahun ke tahun. Upaya pengembangan dan pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung yang pada akhirnya akan mengembangkan pendapatan masyarakat maupun PAD Kabupaten Gunungkidul.

#### 1. Wisata Alam

Wisata alam di Kabupaten Gunungkidul wisata yang ada meliputi pantai, kawasan karst, hutan, dan perbukitan. Potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Gunungkidul memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan potensi pariwisata di daerah lain.

Kawasan wisata pantai merupakan salah satu potensi wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat kurang lebih lima puluh enam pantai yang terbentang sejauh tujuh puluh kilometer di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul. Pantai-pantai yang ada di Kabupaten Gunungkidul memiliki ciri khas yaitu berpasir putih, dikelilingi perbukitan batu kapur, dan pantainya masih alami. Pantai-pantai unggulan di Kabupaten Gunungkidul antara lain Pantai Parangendog (Kecamatan Purwosari), Pantai Gesing (Kecamatan Panggang), Pantai Ngobaran (Kecamatan Saptosari), Pantai Baron (Kecamatan Tanjungsari), Pantai Kukup (Kecamatan Tanjungsari), Pantai Poktunggal (Kecamatan Tepus), Pantai Sundak (Kecamatan Tepus), dan Pantai Sadeng (Kecamatan Girisubo).

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan karst. Kawasan Karst Gunungkidul sangat unik dan bercirikan fenomena di permukaan dan bawah permukaan. Fenomena permukaan meliputi bentuk positif seperti perbukitan karst yang jumlahnya kurang lebih 40.000 bukit berbentuk kerucut, sedangkan bentuk negatifnya berupa lembah-lembah karst dan telaga karst. Fenomena bawah permukaan meliputi goa-goa karst dengan hiasan stalaktit dan stalakmit, dan aliran sungai bawah tanah. Karena keunikan ekosistemnya, pada tahun 1993 International Union of Speleology mengusulkan agar kawasan karst masuk ke salah satu warisan alam dunia. Objek wisata andalan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul antara lain Goa Cerme (Kecamatan Purwosari), Goa Maria Tritis (Kecamatan Paliyan), Goa Rancang Kencono (Kecamatan Playen), Goa Ngingrong (Kecamatan Wonosari), Goa Kali Suci (Kecamatan Semanu), Goa Jomblang (Kecamatan Semanu), Goa Grubug (Kecamatan Semanu), Goa Pindul (Kecamatan Karangmojo), dan Goa Cokro (Kecamatan Ponjong).

Berkaitan dengan kawasan karst, selain objek wisata goa Kabupaten Gunungkidul juga memiliki objek wisata berupa perbukitan. Objek wisata perbukitan tersebut pada umumnya digunakan untuk wisata petualangan misalnya *tracking*, *camping*, dan *outbond*. Bukit yang cukup terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan adalah Gunung Api Purba Nglanggeran dan Bukit Hargodumilah yang terletak di Kecamatan Pathuk. Dari bukit tersebut wisatawan dapat menikmati pemandangan Kota Yogyakarta.

Bentuk permukaan bumi Kabupaten Gunungkidul berbukit-bukit sehingga terdapat pula air terjun yang cukup potensial dikembangkan menjadi objek wisata unggulan. Air terjun yang ada di Kabupaten Gunungkidul meliputi Air Terjun Sri Gethuk (Kecamatan Playen) dan Air Terjun Curug (Kecamatan Gedangsari).

Potensi hutan yang ada di Kabupaten Gunungkidul juga menjadi daya tarik wisata, meskipun tidak sepopuler wisata pantai dan wisata kawasan karst. Hutan wisata di Kabupaten Gunungkidul meliputi Hutan Bunder (Kecamatan Playen), Hutan Wanagama (Kecamatan Playen), dan Hutan Wonosadi (Kecamatan Ngawen). Hutan wisata tersebut pada umumnya digunakan sebagai wisata edukasi dan sebagai *rest area*.

## 2. Wisata Budaya dan Sejarah

Kabupaten Gunungkidul selain kaya akan potensi wisata alam juga cukup kaya akan potensi wisata budaya dan sejarah. Wisata budaya yang ada yang dimiliki antara lain petilasan (peninggalan sejarah), upacara adat, atraksi seni budaya, dan sentra kerajinan.

Kabupaten Gunungkidul pada awalnya merupakan daerah pelarian para prajurit dari Majapahit sehingga terdapat petilasan-petilasan yang dahulunya digunakan sebagai tempat persembunyian. Petilasan yang masih ada hingga saat ini antara lain Pertapaan Kembang Lampir (Kecamatan Panggang), serta Pesanggrahan Gambirowati (Kecamatan Purwosari), Petilasan Gunung Gambar (Kecamatan Ngawen).

Kabupaten Gunungkidul juga memiliki peninggalan purbakala berupa Situs Megalitikum di beberapa lokasi antara lain di Kecamatan Semin, Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Semanu.

Selain peninggalan jaman kerajaan, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki peninggalan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Gunungkidul adalah salah satu daerah yang menjadi saksi perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Peninggalan sejarah yang ada antara lain Monumen Gelaran (Kecamatan Karangmojo) dan Monumen Radio AURI (Kecamatan Playen).

Adat istiadat di Kabupaten Gunungkidul masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakatnya sehingga sering digelar upacara adat dan atraksi budaya yang juga menjadi potensi wisata. Upacara adat yang sering dilaksanakan antara lain sedekah laut, bersih desa, nyadran, dan pembukaan Cupu Panjolo.

Atraksi seni budaya sering digelar terutama pada saat dilaksanakan upacara adat. Atraksi seni budaya yang ada di Kabupaten Gunungkidul antara lain wayang, reog, jathilan, campursari, tayub, kethoprak, karawitan, musik gejog lesung, dan kesenian rinding gumbeng.

Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa sentra kerajinan untuk mendukung potensi pariwisata yang lain. Sentra kerajinan yang ada antara lain sentra kerajinan batik kayu (Kecamatan Pathuk), sentra kerajinan kuningan dan tembaga (Kecamatan Playen), sentra kerajinan perak (Kecamatan Paliyan), sentra kerajinan bambu (Kecamatan Semanu), sentra

kerajinan wayang kulit (Kecamatan Karangmojo), sentra kerajinan batu ukir (Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong), sentra kerajinan akar wangi (Kecamatan Semin), dan sentra kerajinan batik tulis (Kecamatan Ngawen).

### 3. Wisata Buatan

Wisata buatan merupakan objek wisata yang pada umumnya dibangun untuk memberikan daya dukung pada objek wisata alam serta objek wisata budaya dan sejarah yang sudah ada. Wisata buatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul berupa embung, kebun buah, kolam renang, dan bendungan.

Embung dan kebun buah dibangun pada area yang sama dengan Gunung Api Purba Nglanggeran (Kecamatan Pathuk). Tujuan pembangunannya adalah untuk memberi daya dukung terhadap Gunung Api Purba Nglanggeran, agar wisatawan yang berkunjung juga dapat menikmati objek wisata lain dalam satu area.

Beberapa kolam renang juga dibangun untuk memberi daya dukung pada objek wisata alam serta objek wisata budaya dan sejarah di sekitarnya. Kolam renang yang ada antara lain Water Byur dan Gunung Kendhil (Kecamatan Ponjong), Dian Tirta (Kecamatan Semanu), Jeplak (Kecamatan Playen), Tirta Ria, Water Palace, dan Bent Sporty (Kecamatan Wonosari).

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data Responden

Data mengenai responden yang telah diperoleh melalui kuesioner perlu diolah untuk mengetahui karakteristik responden penelitian. Pengolahan data responden dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Karakteristik responden dibagi ke dalam jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan instansi tempat bertugas.

Kuesioner yang telah dibagikan kepada responden berjumlah 35 dan diperoleh kembali sejumlah 30, yang berarti tingkat pengembalian sebesar 85,71%. Ketiga puluh kuesioner yang diperoleh kembali dapat diolah semuanya. Berikut ini data karakteristik responden.

##### 1. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi responden pria dan responden wanita.

Tabel 5. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	22	73,33 %
Wanita	8	26,67 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Tabel 5 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Total responden adalah sejumlah 30 orang yang terdiri dari 22 orang pria atau sebesar 73,33% dari total responden dan 8 orang wanita atau sebesar 26,66% dari total responden.

2. Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dibedakan menjadi responden lulusan SD/ Sederajat, responden lulusan SMP/ Sederajat, responden lulusan SMA/ SMK/ Sederajat, responden lulusan Diploma, responden lulusan S1, responden lulusan S2, dan responden lulusan S3.

Tabel 6. Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/ Sederajat	0	0,00 %
SMP/ Sederajat	0	0,00 %
SMA/ SMK/ Sederajat	6	20,00 %
Diploma	1	3,34 %
S1	13	43,33 %
S2	10	33,33 %
S3	0	0,00 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Tabel 6 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Total responden adalah sejumlah 30 orang yang terdiri dari 6 orang lulusan SMA/ SMK/ Sederajat atau sebesar 20,00% dari total responden, 1 orang lulusan diploma atau sebesar 3,34% dari total responden, 13 orang lulusan S1 atau sebesar 43,33% dari total responden, dan 10 orang lulusan S2 atau sebesar 33,33% total responden.

3. Instansi Tempat Bertugas

Karakteristik responden berdasarkan tempat bertugas dibedakan menjadi responden yang bertugas di DPPKAD Kabupaten Gunungkidul, responden yang bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan responden yang bertugas di Disbudpar Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 7. Responden berdasarkan Instansi Tempat Bertugas

Instansi	Jumlah	Persentase
DPPKAD	7	23,33 %
Inspektorat Daerah	8	26,67 %
Disbudpar	15	50,00 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Tabel 7 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan instansi tempat bertugas. Total responden adalah sejumlah 30 orang yang terdiri dari 7 orang PNS yang bertugas di DPPKAD atau sebesar 23,33% dari total responden, 8 orang PNS yang bertugas di Inspektorat Daerah atau sebesar 26,66% dari total responden, dan 15 orang PNS yang bertugas di Disbudpar atau sebesar 50,00% dari total responden.

## B. Pengujian Data

### 1. Uji Validitas

Kuesioner yang telah digunakan untuk pengumpulan data perlu melalui proses pengujian. Pengujian yang pertama adalah uji validitas. Validitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan valid yang berarti dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila  $r_{hitung}$  lebih besar atau sama dengan  $r_{tabel}$ . Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* oleh Karl Pearson antara setiap butir dengan skor totalnya dengan bantuan *Microsoft Excel 2007*.

Hasil pengujian validitas instrumen ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Validitas

Nomor Instrumen	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,43	0,36	valid
2	0,58	0,36	valid
3	0,66	0,36	valid
4	0,68	0,36	valid
5	0,50	0,36	valid
6	0,62	0,36	valid
7	0,80	0,36	valid
8	0,68	0,36	valid
9	0,52	0,36	valid
10	0,61	0,36	valid
11	0,59	0,36	valid
12	0,36	0,36	valid
13	0,69	0,36	valid
14	0,24	0,36	tidak valid
15	0,49	0,36	valid
16	0,62	0,36	valid
17	0,73	0,36	valid
18	0,76	0,36	valid

Sumber: olah data penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari delapan belas pernyataan terdapat satu pernyataan yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid adalah nomor 14 yaitu pernyataan mengenai kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata yang berbunyi “Tidak ada pengaduan atau keluhan dari pengunjung objek wisata terkait pelayanan petugas”. Sugiyono (2009:173) menyatakan bahwa instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Pernyataan nomor 14 tidak digunakan karena tidak dapat masuk pada pengujian berikutnya dan jika tetap digunakan akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Berikut ini hasil uji validitas setelah pernyataan nomor 14 dihilangkan.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas setelah pernyataan nomor 14 dihilangkan

Nomor Instrumen	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,43	0,36	valid
2	0,58	0,36	valid
3	0,66	0,36	valid
4	0,68	0,36	valid
5	0,50	0,36	valid
6	0,62	0,36	valid
7	0,80	0,36	valid
8	0,68	0,36	valid
9	0,52	0,36	valid
10	0,61	0,36	valid
11	0,59	0,36	valid
12	0,36	0,36	valid
13	0,69	0,36	valid
15	0,49	0,36	valid
16	0,62	0,36	valid
17	0,73	0,36	valid
18	0,76	0,36	valid

Sumber: olah data penelitian

## 2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid akan diuji reliabilitasnya. Reliabilitas menunjukkan kemampuan instrumen untuk mengukur obyek yang sama beberapa kali dan akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik *Spearman-Brown* dengan bantuan *Microsoft Excel 2007*. Berikut ini hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen penelitian:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

$$r_i = \frac{2(0,863)}{1 + 0,863}$$

$$r_i = 0,926$$

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen ( $r_i$ ) adalah sebesar 0,926 yang berarti lebih besar dari nilai kritis (0,80), dengan demikian reliabilitas instrumen dikatakan baik dan telah memenuhi syarat untuk analisis selanjutnya.

### C. Analisis Deskriptif Jawaban Kuesioner

Sebelum menjawab masalah penelitian, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif atas jawaban kuesioner. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui frekuensi jawaban responden pada masing-masing butir pernyataan dalam kuesioner.

Pernyataan nomor 1 terkait dengan informasi pemeriksaan diperoleh dari pegawai Disbudpar yang membidangi objek pemeriksaan. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 1:

Tabel 10. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 1

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	13	43,33 %
setuju	14	46,67 %
ragu-ragu	1	3,33 %
tidak setuju	2	6,67 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 13 orang atau sebesar 43,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 46,67%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 1 orang atau sebesar 3,33%, responden yang menyatakan

tidak setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 1 adalah sangat setuju dan setuju. Namun demikian terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, informasi dalam proses pemeriksaan belum sepenuhnya diperoleh dari pegawai Disbudpar yang membidangi objek pemeriksaan.

Pernyataan nomor 2 terkait dengan informasi pemeriksaan didukung dengan data yang memadai. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 2:

Tabel 11. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 2

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	22	73,33 %
setuju	8	26,67 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 22 orang atau sebesar 73,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 26,67%, dan tidak ada responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, informasi dalam proses pemeriksaan telah didukung dengan data yang memadai.

Pernyataan nomor 3 terkait dengan pengambilan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan beberapa (lebih dari satu) sumber. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 3:

Tabel 12. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 3

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	21	70 %
setuju	9	30 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 21 orang atau sebesar 70%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 30%, dan tidak ada responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, pengambilan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan informasi dari beberapa (lebih dari satu) sumber.

Pernyataan nomor 4 terkait dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai rencana yaitu pada bulan November. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 4:

Tabel 13. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 4

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	11	36,67 %
setuju	14	46,66 %
ragu-ragu	5	16,67 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 11 orang atau sebesar 36,67%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 46,66%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 5 orang atau sebesar 16,67%, dan tidak ada responden tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 4 adalah sangat setuju dan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, waktu pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai rencana yaitu pada bulan November.

Pernyataan nomor 5 terkait dengan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan yang sesuai rencana yaitu pada bulan November. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 5:

Tabel 14. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 5

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	5	16,67 %
setuju	14	46,66 %
ragu-ragu	9	30 %
tidak setuju	2	6,67 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 16,67%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 46,66%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 9 orang atau sebesar 30%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%, dan tidak ada responden menyatakan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 5 adalah sangat setuju dan setuju. Namun demikian terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, waktu penyampaian hasil pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai rencana yaitu pada bulan November.

Pernyataan nomor 6 terkait dengan waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sesuai rencana yaitu pada bulan Desember. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 6:

Tabel 15. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 6

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	6	20 %
setuju	18	60 %
ragu-ragu	4	13,33 %
tidak setuju	2	6,67 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang atau sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 18 orang atau sebesar 60%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 4 orang atau sebesar 13,33%, responden yang

menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%, dan tidak ada responden menyatakan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 6 adalah sangat setuju dan setuju. Namun demikian terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai rencana yaitu pada bulan Desember.

Pernyataan nomor 7 terkait dengan fokus pemeriksaan pada kegiatan pengelolaan keuangan Disbudpar. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 7:

Tabel 16. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 7

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	10	33,33 %
setuju	17	56,67 %
ragu-ragu	2	6,67 %
tidak setuju	1	3,33 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 10 orang atau sebesar 33,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 17 orang atau sebesar 56,67%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 3,33%, dan tidak ada responden menyatakan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 7 adalah sangat setuju dan setuju. Namun demikian terdapat pula responden yang menyatakan

tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, kegiatan pengelolaan keuangan Disbudpar belum sepenuhnya menjadi fokus pemeriksaan.

Pernyataan nomor 8 terkait dengan fokus pemeriksaan pada kegiatan pemungutan retribusi kepariwisataan. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 8:

Tabel 17. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 8

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	9	30 %
setuju	20	66,67 %
ragu-ragu	1	3,33 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 30%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 20 orang atau sebesar 66,67%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 1 orang atau sebesar 3,33%, dan tidak ada responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 8 adalah sangat setuju dan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, kegiatan pemungutan retribusi kepariwisataan telah menjadi fokus pemeriksaan.

Pernyataan nomor 9 terkait dengan fokus pemeriksaan pada kegiatan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepariwisataan. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 9:

Tabel 18. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 9

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	11	36,67 %
setuju	19	63,33 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 11 orang atau sebesar 36,67%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 19 orang atau sebesar 63,33%, dan tidak ada responden menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 9. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, kegiatan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepariwisataan telah menjadi fokus pemeriksaan.

Pernyataan nomor 10 terkait dengan kemampuan laporan hasil pemeriksaan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 10:

Tabel 19. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 10

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	6	20 %
setuju	19	63,33 %
ragu-ragu	3	10 %
tidak setuju	2	6,67 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang atau sebesar 20%, responden yang menyatakan

setuju berjumlah 19 orang atau sebesar 63,33%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 3 orang atau sebesar 10%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 10 adalah sangat setuju dan setuju. Namun demikian terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, laporan hasil pemeriksaan belum sepenuhnya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan.

Pernyataan nomor 11 terkait dengan kemampuan laporan hasil pemeriksaan memberikan rekomendasi tindakan koreksi yang perlu segera dilakukan. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 11:

Tabel 20. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 11

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	15	50 %
setuju	15	50 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 15 orang atau sebesar 50%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 15 orang atau sebesar 50%, dan tidak ada responden menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 11. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden,

laporan hasil pemeriksaan telah memuat rekomendasi tindakan koreksi yang perlu segera dilakukan.

Pernyataan nomor 12 terkait dengan kemudahan laporan hasil pemeriksaan untuk dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak Disbudpar. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 12:

Tabel 21. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 12

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	10	33,33 %
setuju	18	60 %
ragu-ragu	2	6,67 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 10 orang atau sebesar 33,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 18 orang atau sebesar 60%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 12 adalah sangat setuju dan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, laporan hasil pemeriksaan dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan mudah oleh pihak Disbudpar.

Pernyataan nomor 13 terkait dengan terpenuhinya target jumlah PAD sektor pariwisata. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 13:

Tabel 22. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 13

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	22	73,33 %
setuju	5	16,67 %
ragu-ragu	3	10 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 22 orang atau sebesar 73,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 16,67%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 3 orang atau sebesar 10%, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 13 adalah sangat setuju dan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, target jumlah PAD sektor pariwisata sebesar Rp5,1 milyar pada tahun 2013 telah terpenuhi.

Pernyataan nomor 15 terkait dengan adanya indikasi atau gejala penyimpangan dari aturan dalam pengelolaan PAD sektor pariwisata. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 15:

Tabel 23. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 15

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	7	23,33 %
setuju	10	33,33 %
ragu-ragu	7	23,33 %
tidak setuju	5	16,67 %
sangat tidak setuju	1	3,34 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 7 orang atau sebesar 23,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 10 orang atau sebesar 33,33%, responden yang menyatakan ragu-ragu berjumlah 7 orang atau sebesar 23,33%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 16,67%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 3,34%

Jawaban responden yang dominan atas pernyataan nomor 15 adalah sangat setuju dan setuju. Namun demikian terdapat pula responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, masih ada indikasi atau gejala penyimpangan dari aturan dalam pengelolaan PAD sektor pariwisata.

Pernyataan nomor 16 terkait dengan kemampuan PAD sektor pariwisata meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 16:

Tabel 24. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 16

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	21	70 %
setuju	9	30 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 21 orang atau sebesar 70%, responden yang menyatakan

setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 30%, dan tidak ada responden menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 16. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, PAD sektor pariwisata telah mampu meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul.

Pernyataan nomor 17 terkait dengan kemampuan pengelolaan PAD sektor pariwisata yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam meningkatkan PAD Desa. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 17:

Tabel 25. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 17

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	17	56,67 %
setuju	13	43,33 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 17 orang atau sebesar 56,67%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 13 orang atau sebesar 43,33%, dan tidak ada responden menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 17. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, pengelolaan PAD sektor pariwisata yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa telah mampu meningkatkan PAD Desa.

Pernyataan nomor 18 terkait dengan kemampuan pengelolaan PAD sektor pariwisata yang bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut ini tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 18:

Tabel 26. Tabel frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 18

Jawaban	Frekuensi	Persentase
sangat setuju	19	63,33 %
setuju	11	36,67 %
ragu-ragu	0	0 %
tidak setuju	0	0 %
sangat tidak setuju	0	0 %
Total	30	100 %

Sumber: olah data penelitian

Berdasarkan tabel tersebut di atas, responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 19 orang atau sebesar 63,33%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 11 orang atau sebesar 36,67%, dan tidak ada responden menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Semua responden menyatakan sangat setuju dan setuju atas pernyataan nomor 18. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut persepsi responden, pengelolaan PAD sektor pariwisata yang bekerjasama dengan masyarakat telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **D. Analisis Hubungan Pengawasan Fungsional dengan Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata**

Hubungan Pengawasan Fungsional dengan Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata dianalisis menggunakan *Spearman Rank* dengan bantuan program *SPSS for Windows 18*. Berikut ini hasil analisis *Spearman Rank*:

Tabel 27. Hasil Analisis Korelasi *Spearman Rank*

			<b>Correlations</b>	
			Pengawasan Fungsional	Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata
Spearman's rho	Pengawasan Fungsional	Correlation Coefficient	1.000	.502**
		Sig. (2-tailed)	.	.005
		N	30	30
	Kinerja Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata	Correlation Coefficient	.502**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.005	.
		N	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: olah data penelitian

Nilai koefisien korelasi *Spearman Rank* ( $r_s$ ) berdasarkan perhitungan di atas diketahui sebesar 0,502. Koefisien korelasi *Spearman Rank* tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan uji t untuk mengetahui korelasi antara variabel Pengawasan Fungsional (X) dengan variabel Kinerja Pengelolaan PAD sektor pariwisata (Y). Hasil perhitungan uji t akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ , apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Berikut ini perhitungan uji t:

$$t_0 = r_s \sqrt{\frac{n - 2}{1 - r_s^2}}$$

$$t_0 = 0,502 \sqrt{\frac{30 - 2}{1 - 0,502^2}}$$

$$t_0 = 0,502 \sqrt{\frac{28}{0,747}}$$

$$t_0 = 0,502 \sqrt{37,433}$$

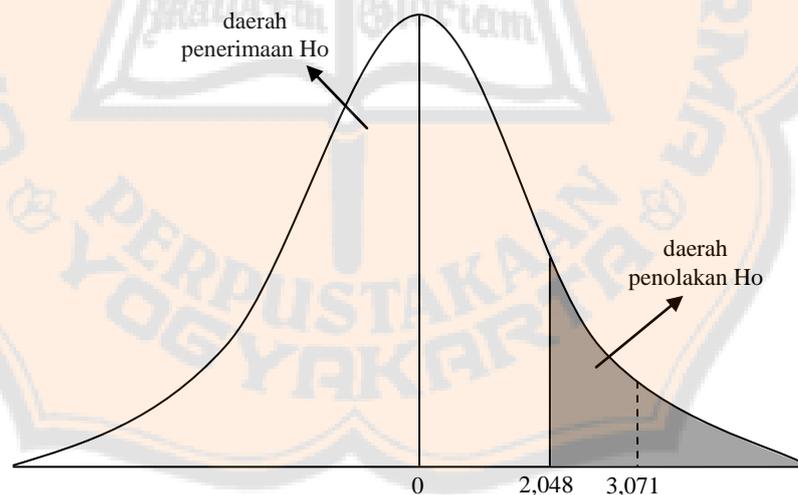
$$t_0 = 3,071$$

Nilai  $t_{hitung}$  berdasarkan perhitungan di atas adalah sebesar 3,071. Nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf nyata 2,5% uji satu arah dan jumlah responden 30 maka derajat kebebasan 28 (30-2) adalah sebesar 2,048. Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Ho diterima jika  $t_{hitung} \leq 2,048$

Ho ditolak jika  $t_{hitung} > 2,048$

Nilai  $t_{hitung}$  (3,071) > nilai  $t_{tabel}$  (2,048) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini daerah penolakan Ho :



Gambar 5: Kurva hasil pengujian hipotesis

### E. Pembahasan

Setiap daerah memiliki rencana pembangunan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul adalah potensi pariwisata, dengan demikian potensi pariwisata

menjadi sektor yang diprioritaskan. Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat menghasilkan PAD.

Pengelolaan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Disbudpar. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam pengelolaan PAD meliputi pemungutan retribusi kepariwisataan pada masing-masing pos masuk objek wisata, penyetoran dari pos masuk objek wisata ke kantor Disbudpar, dan penyetoran dari kantor Disbudpar ke kantor DPPKAD.

Disbudpar memiliki target dalam pengelolaan PAD sektor pariwisata. Kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata dikatakan baik jika target-target tersebut telah tercapai. Kinerja pengelolaan PAD dapat dinilai dari aspek keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Aspek keluaran (*output*) meliputi jumlah PAD sektor pariwisata, pelayanan yang baik kepada pengunjung, dan pengelolaan PAD yang sesuai dengan aturan. Aspek hasil (*outcome*) merupakan aspek yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*) dan dapat dilihat dari meningkatnya PAD Kabupaten Gunungkidul, PAD Desa terkait, dan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengawasan fungsional melalui lembaga independen yaitu Inspektorat Daerah. Pengawasan fungsional dilakukan dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik adalah pelaksanaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan aturan, rencana, dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan fungsional dapat tercapai jika pengawasan fungsional dilakukan dengan baik. Pengawasan fungsional yang baik adalah pengawasan fungsional yang memenuhi kriteria akurat, tepat waktu, terpusat pada titik-titik strategis, dan bersifat sebagai petunjuk/ operasional.

Secara teoritis pengawasan fungsional memiliki hubungan positif dengan kinerja pemerintah daerah, karena tujuan dilaksanakannya pengawasan fungsional adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintah daerah yang baik. Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik, sedangkan pengawasan fungsional yang tidak dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang tidak baik.

Pengelolaan PAD sektor pariwisata merupakan salah satu bagian pelaksanaan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata juga memiliki hubungan positif dengan pengawasan fungsional.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) dalam penelitian ini menyatakan tidak terdapat hubungan positif antara pengawasan fungsional dengan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dalam penelitian ini menyatakan terdapat hubungan positif antara pengawasan fungsional dengan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Analisis data dalam penelitian ini menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,071 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (2,048), dengan demikian berdasarkan

kriteria pengujian hipotesis maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulan yang diambil adalah ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata berarti jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata cenderung baik. Sedangkan jika pengawasan fungsional tidak dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata juga cenderung tidak baik.

Pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara kondisi nyata dan standar atau rencana yang ditetapkan sebelumnya, menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan memberikan rekomendasi tindakan koreksi yang diperlukan. Dengan demikian pengawasan fungsional dapat menjamin tercapainya kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata yang sesuai dengan rencana.

Kesimpulan dalam penelitian ini telah sesuai dan mendukung teori pengawasan fungsional yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik. Kesimpulan dalam penelitian ini juga telah mendukung kesimpulan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudi Harto, Andhika Ardiansyah, dan Dina Handayani.

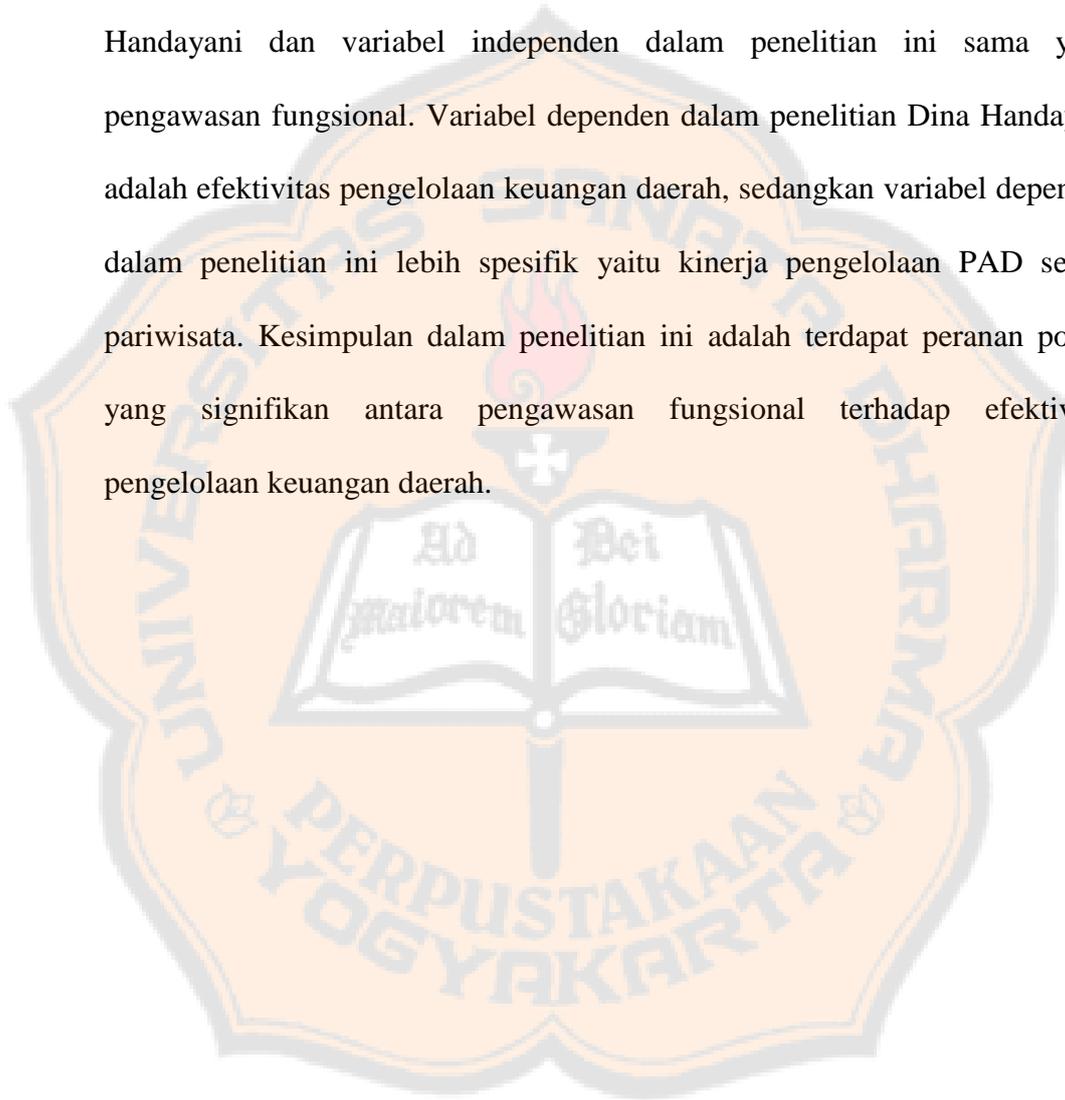
Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Harto berjudul Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Daerah. Penelitian Rudi Harto dilaksanakan pada tahun 2012 pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian Rudi Harto yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, sedangkan dalam penelitian ini hanya ada satu variabel independen yaitu pengawasan fungsional. Variabel dependen dalam penelitian Rudi Harto adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan dalam penelitian ini variabel dependennya lebih spesifik yaitu kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata. Kesimpulan dalam penelitian Rudi Harto adalah pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Ardiansyah berjudul Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian Andhika Ardiansyah dilaksanakan pada tahun 2010 di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Variabel independen dalam penelitian Andhika Ardiansyah dan variabel independen dalam penelitian ini sama yaitu pengawasan fungsional. Variabel dependen dalam penelitian Andhika Ardiansyah adalah kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata. Kesimpulan dalam penelitian Andhika Ardiansyah adalah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Handayani berjudul Peranan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian Dina Handayani

dilaksanakan pada tahun 2008 pada Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Variabel independen dalam penelitian Dina Handayani dan variabel independen dalam penelitian ini sama yaitu pengawasan fungsional. Variabel dependen dalam penelitian Dina Handayani adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat peranan positif yang signifikan antara pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis data menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan positif antara pengawasan fungsional dan kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan persepsi PNS di Inspektorat Daerah, DPPKAD, dan Disbudpar.

Hubungan positif menunjukkan bahwa jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata cenderung baik. Sebaliknya jika pengawasan fungsional tidak dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pengelolaan PAD sektor pariwisata juga cenderung tidak baik.

#### B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah responden berdasarkan jenis kelamin kurang proporsional sehingga terjadi *gender effect* dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam memberikan jawaban. Hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian.

### C. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
  - a. Informasi dalam proses pemeriksaan sebaiknya diperoleh dari pegawai Disbudpar yang membidangi objek pemeriksaan agar informasi lebih akurat.
  - b. Waktu pelaksanaan pemeriksaan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebaiknya dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) agar pengawasan menjadi relevan dengan kondisi yang ada.
  - c. Pemeriksaan sebaiknya lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Disbudpar, karena pada umumnya dalam kegiatan-kegiatan strategis sangat rawan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

2. Bagi Disbudpar Kabupaten Gunungkidul

Disbudpar sebaiknya melakukan pembinaan kepada para petugas pemungut retribusi di setiap pos masuk objek wisata agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengunjung. Dengan pelayanan yang baik diharapkan keluhan-keluhan dari pengunjung atas pelayanan petugas dapat dikurangi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama sebaiknya menentukan responden pada masing-masing karakteristik dengan jumlah yang proporsional.



**Daftar Pustaka**

- Ardiansyah, Andhika. 2010. "Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Pasundan, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2011. *Gunungkidul Dalam Angka 2011*. <http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=318>. Diakses tanggal 17 September 2013
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2012. *Gunungkidul Dalam Angka 2012*. <http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=322>. Diakses tanggal 17 September 2013
- Bupati Gunungkidul. 2012. *Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 415/KPTS/2012 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013*. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul.
- Daft, Richard L. 2009. *Management*. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- Handayani, Dina. 2008. "Peranan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Widyatama, Bandung.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Edisi kedua. BPFE, Yogyakarta.
- Harto, Rudi. 2012. "Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya)". *e-journal Universitas Siliwangi Tasikmalaya*. <http://journal.unsil.ac.id/mhs-3403.html>. Diakses tanggal 18 September 2013.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara, Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. 1989. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat*. <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/1989-Inpres-1.pdf>. Diakses tanggal 2 Oktober 2013.
- Jogiyanto HM. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.

- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. [http://lms.bpkp.go.id/file.php/1/Pedoman\\_Pengelolaan\\_Keuangan\\_Daerah\\_Permendagri\\_No\\_13\\_thn\\_2006\\_.pdf](http://lms.bpkp.go.id/file.php/1/Pedoman_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_Permendagri_No_13_thn_2006_.pdf). Diakses tanggal 19 September 2013.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 2013. *Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 34/DPA/2013 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013*. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul.
- Presiden Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1124/node//pp-no-20-tahun-2001-pembinaan-dan-pengawasan-atas-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah>. Diakses tanggal 17 September 2013.
- Sekaran, Uma., dan Roger Bougie. 2009. *Research Methods for Business A Skill Building-Approach*. Edisi kelima. John Wiley and Sons, Ltd., Chichester.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf). Diakses tanggal 17 September 2013.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/28TAHUN2009UU.htm>. Diakses tanggal 19 September 2013.



# LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**Kuesioner Penelitian**  
**KUESIONER PENELITIAN**

Yth. Bapak/ Ibu .....  
di Gunungkidul

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul “Hubungan Pengawasan Fungsional dengan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul”, bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Saya harapkan Bapak/ Ibu bersedia menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini dengan jawaban yang jujur dan objektif agar diperoleh hasil penelitian yang maksimal. Perlu diketahui bahwa jawaban yang diberikan tidak akan memengaruhi status dan jabatan Bapak/ Ibu. Selain itu saya juga akan menjaga kerahasiaan jawaban dan identitas Bapak/ Ibu.

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan, atas kerjasama yang Bapak/ Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Februari 2014

Hormat saya,

Thomas Wigung Aji Prayitna  
Mahasiswa Jurusan Akuntansi  
Universitas Sanata Dharma

**A. Identitas Responden**

Mohon Bapak/ Ibu bersedia melengkapi daftar isian berikut dengan mengisi dan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Usia : \_\_\_\_\_
4. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
5. Instansi :  Inspektorat  DPPKAD  Disbudpar
6. Jabatan/ Posisi : \_\_\_\_\_
7. Pendidikan terakhir :  SD/ Sederajat  SMP/Sederajat  
 SMA/SMK/Sederajat  Diploma  
 S1  S2  
 S3

**B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Mohon dengan hormat Bapak/ Ibu membaca setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berikan tanggapan Bapak/ Ibu dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang disediakan. Tanggapan yang tersedia adalah SS: sangat setuju; S: setuju; R: ragu-ragu; TS: tidak setuju; STS: sangat tidak setuju.

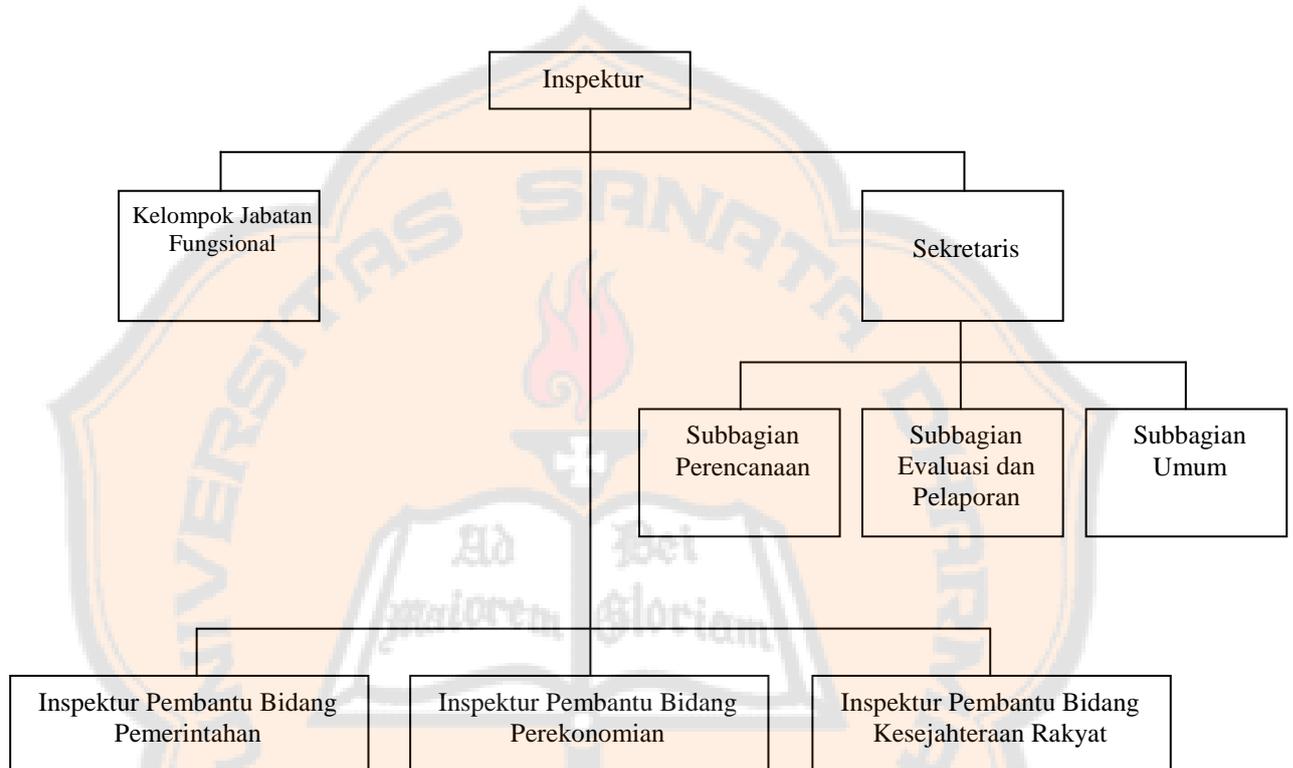
**C. Kuesioner**

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	R	TS	STS
<b>Pernyataan nomor 1-12 terkait dengan Pengawasan Fungsional (Inspektorat)</b>						
1.	Informasi dalam proses pemeriksaan diperoleh dari pegawai Disbudpar yang membidangi objek pemeriksaan.					
2.	Informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan didukung dengan data yang memadai.					
3.	Pengambilan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan informasi dari beberapa (lebih dari satu) sumber.					
4.	Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada bulan November.					
5.	Penyampaian laporan hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada bulan November.					
6.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada bulan Desember					
7.	Kegiatan pengelolaan keuangan Disbudpar telah menjadi fokus pemeriksaan.					
8.	Kegiatan pemungutan retribusi kepariwisataan telah menjadi fokus pemeriksaan.					
9.	Kegiatan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepariwisataan telah menjadi fokus pemeriksaan.					
10.	Laporan hasil pemeriksaan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan.					
11.	Laporan hasil pemeriksaan memuat rekomendasi tindakan koreksi yang perlu segera dilakukan.					

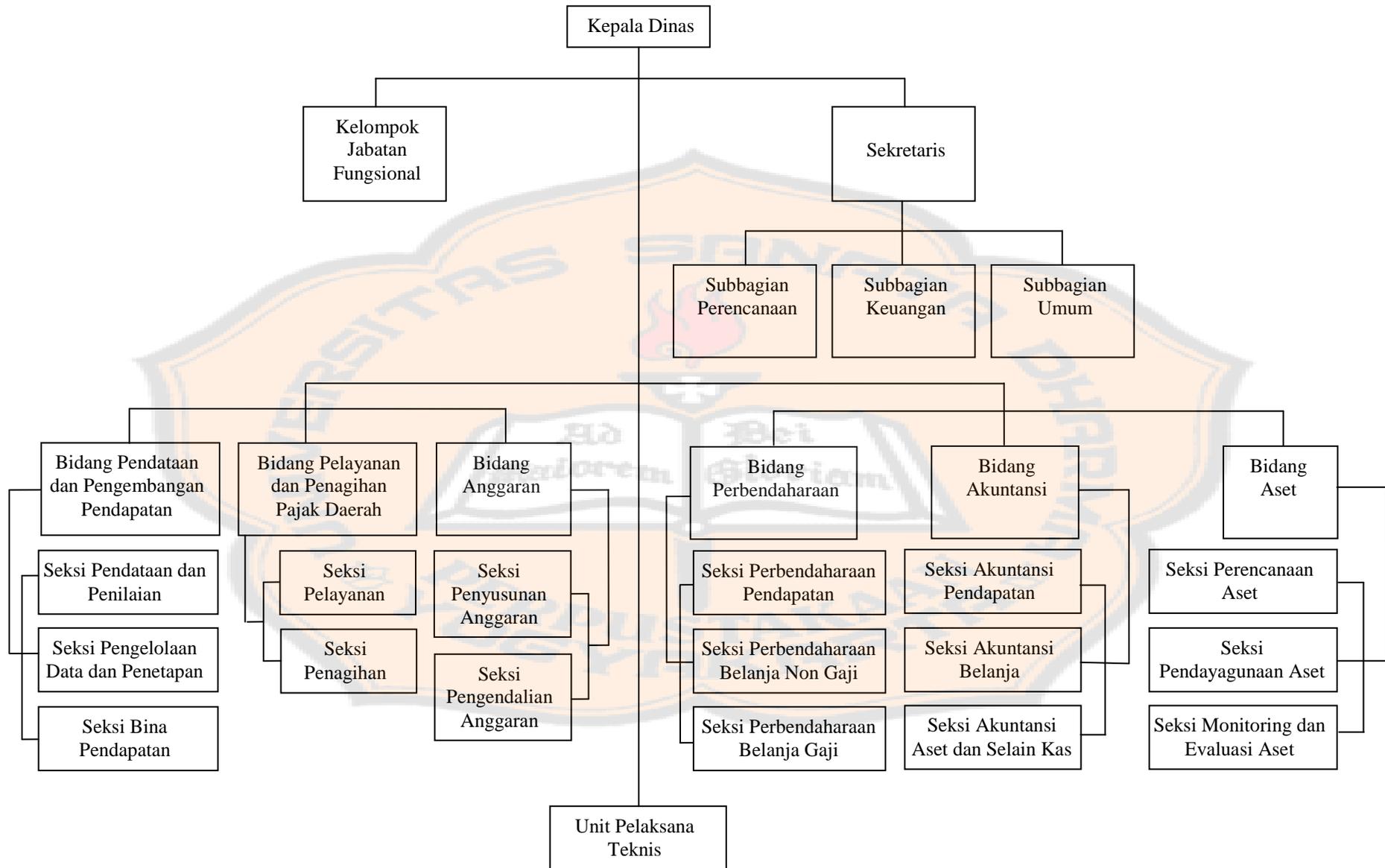
12.	Laporan hasil pemeriksaan dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan mudah oleh pihak Disbudpar.					
-----	---	--	--	--	--	--

<b>Pernyataan nomor 13-18 terkait dengan Kinerja Pengelolaan PAD sektor pariwisata (Disbudpar)</b>						
13.	Target jumlah PAD sektor pariwisata sebesar Rp5,1 milyar pada tahun 2013 telah terpenuhi.					
14.	Tidak ada pengaduan atau keluhan dari pengunjung objek wisata terkait pelayanan petugas.					
15.	Tidak terjadi indikasi atau gejala penyimpangan dari aturan dalam pengelolaan PAD sektor pariwisata.					
16.	PAD sektor pariwisata mampu meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul.					
17.	Pengelolaan PAD sektor pariwisata yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa mampu meningkatkan PAD Desa.					
18.	Pengelolaan PAD sektor pariwisata yang bekerjasama dengan masyarakat mampu menongkatkan pendapatan masyarakat.					

**Lampiran 2**  
**Bagan Struktur Organisasi**

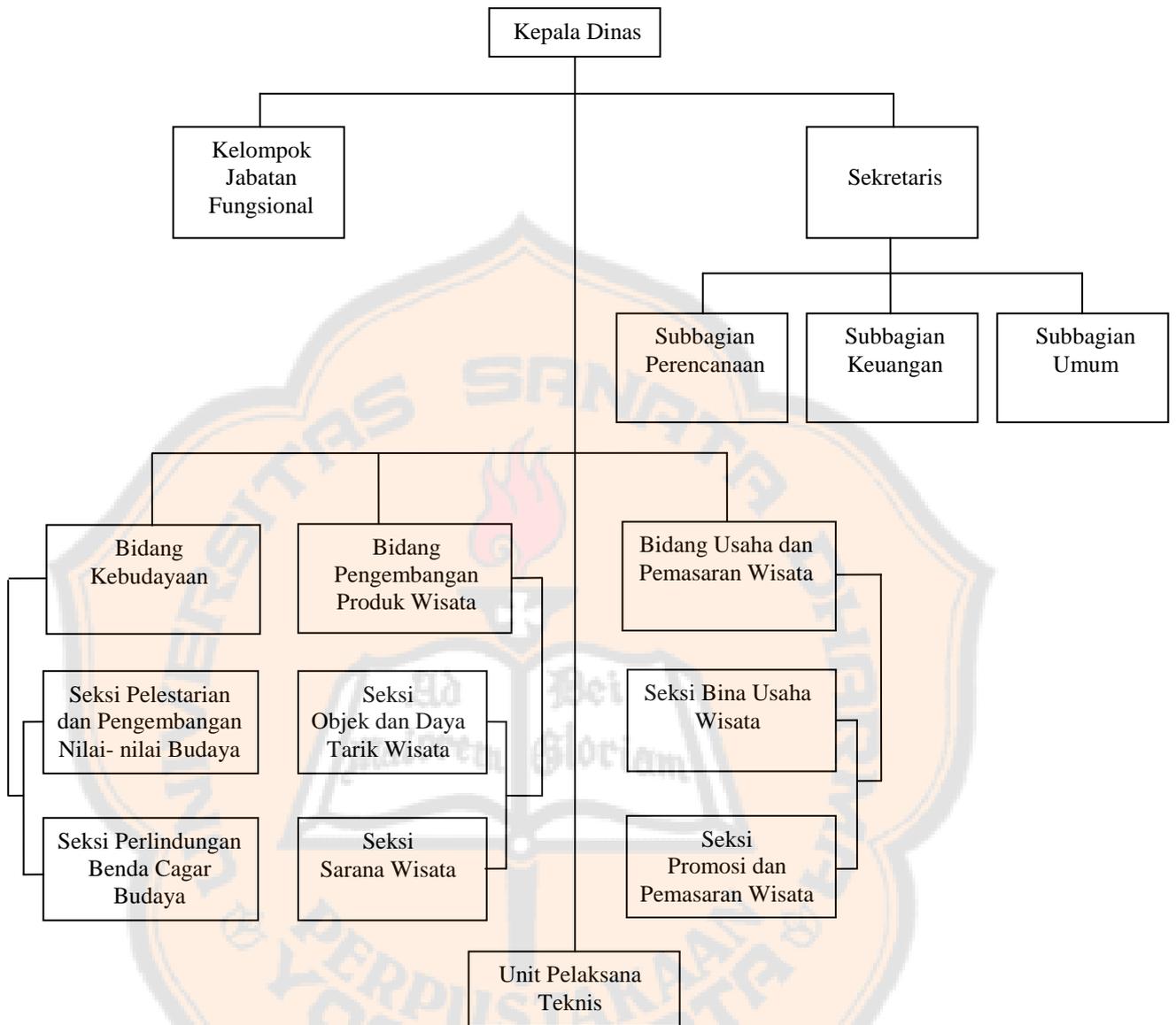


Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Sumber: olah data penelitian



Gambar 7: Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Sumber: olah data penelitian



Gambar 8: Struktur Organisasi Disbudpar Kabupaten Gunungkidul  
 Sumber: olah data penelitian

Lampiran 3  
Uji Validitas

No. Responden	No. Pertanyaan																		sum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	5	4	4	67
2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	70
3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	2	4	5	5	5	77
4	5	5	5	4	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	82
5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	70
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
7	2	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	2	4	5	4	5	75
8	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	3	4	5	4	5	79
9	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	82
10	3	4	5	3	3	4	4	4	4	2	5	4	5	2	5	5	5	5	72
11	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	4	69
12	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5	3	5	4	3	4	4	4	78
13	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	4	4	70
14	5	5	5	5	3	3	5	5	5	4	5	4	5	3	3	5	5	5	80
15	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	5	5	5	75
16	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	5	5	5	78
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	71
18	4	5	5	5	2	5	4	4	4	3	5	4	5	3	5	5	5	5	78
19	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	81

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	85
21	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	81
22	5	5	5	5	3	4	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	5	5	82
23	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	3	2	4	4	4	72
24	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	88
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	3	5	5	5	84
26	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	77
27	4	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	62
28	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	75
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	1	5	5	5	83
30	4	4	4	4	4	2	3	4	5	3	4	4	3	4	2	4	4	4	66
<b>r hitung</b>	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	
<b>r tabel</b>	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
<b>keterangan</b>	valid	tidak	valid	valid	valid	valid													



Lampiran 4  
Uji Reliabilitas

No. Responden	No. Pertanyaan									SUM
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	
1	2	5	4	4	4	4	4	2	4	33
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	39
4	5	5	3	5	5	5	5	3	5	41
5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	2	5	4	4	5	5	5	4	4	38
8	4	5	4	5	4	4	5	4	4	39
9	4	5	4	4	4	5	5	5	5	41
10	3	5	3	4	4	5	5	5	5	39
11	4	4	3	3	4	4	5	2	4	33
12	5	5	4	5	5	5	5	3	4	41
13	4	4	3	4	4	4	5	3	4	35
14	5	5	3	5	5	5	5	3	5	41
15	5	5	3	4	4	4	5	3	5	38
16	5	5	4	4	4	4	5	4	5	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	5	2	4	4	5	5	5	5	39

No. Responden	No. Pertanyaan								SUM
	2	4	6	8	10	12	16	18	
1	5	4	4	4	2	4	5	4	32
2	5	4	4	4	3	4	4	4	32
3	5	4	4	4	4	5	5	5	36
4	5	4	3	5	4	5	5	5	36
5	4	4	3	3	4	4	4	4	30
6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	5	3	4	4	4	5	5	5	35
8	5	5	4	4	5	4	5	5	37
9	4	4	4	4	5	5	5	5	36
10	4	3	4	4	2	4	5	5	31
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	5	5	3	5	4	3	4	4	33
13	4	3	4	4	4	4	5	4	32
14	5	5	3	5	4	4	5	5	36
15	5	3	4	4	4	4	5	5	34
16	5	4	4	4	4	4	5	5	35
17	4	4	4	4	4	3	4	4	31
18	5	5	5	4	3	4	5	5	36

19	4	5	4	4	4	5	5	5	5	41
20	5	5	5	5	5	4	5	4	5	43
21	4	5	3	4	4	5	5	5	5	40
22	5	5	3	5	5	5	5	4	5	42
23	4	5	3	4	4	5	4	2	4	35
24	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
25	5	5	5	5	5	5	5	3	5	43
26	5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
27	4	4	2	2	4	4	3	2	4	29
28	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
29	5	5	5	5	5	5	5	1	5	41
30	4	4	4	3	5	4	3	2	4	33

19	5	4	4	4	4	5	5	5	36
20	5	5	5	5	4	4	5	5	38
21	5	5	4	4	4	5	5	5	37
22	5	5	4	5	4	4	5	5	37
23	5	4	4	4	4	5	4	4	34
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40
25	5	5	5	5	5	4	5	5	39
26	5	4	4	4	4	4	5	5	35
27	4	3	2	4	4	4	4	4	29
28	5	4	4	4	4	5	4	4	34
29	5	5	5	5	5	4	5	5	39
30	4	4	2	4	3	4	4	4	29

**r= 0.863165182**

**ri= 0.926557871**